



PENGUKURAN EFISIENSI BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) DENGAN PENDEKATAN INTERMEDIASI TAHUN 2025

Nailil Azizah¹, Zahra Ramadhani²

Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan bisnis Islam, Universitas Islam
Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email :

nailiazizah130@gmail.com zr85607@gmail.com

Abstract. *Islamic Rural Banks (BPRS) play an important role in supporting the development of the Islamic financial industry through their intermediation function of collecting public funds and channeling them into financing activities. As competition in the Islamic banking sector continues to increase, efficiency has become an essential indicator for evaluating the ability of BPRS to utilize available resources optimally. This study aims to measure the efficiency level of Islamic Rural Banks in Indonesia in 2025 using the Data Envelopment Analysis (DEA) method with an intermediation approach. This research employs a quantitative method using secondary data obtained from the Islamic Banking Statistics published by the Financial Services Authority (OJK) in 2025. The units of analysis consist of 22 provinces with active BPRS operations. The input variables include total assets and Third-Party Funds (TPF), while financing is used as the output variable. The analysis applies the DEA CCR model (Constant Return to Scale) with an input-oriented approach. The results reveal that the efficiency performance of BPRS varies across provinces. Of the 22 provinces analyzed, only three provinces, namely Riau Islands, Lampung, and DKI Jakarta, achieved full efficiency with a DEA score of 1.000. Meanwhile, the remaining 19 provinces were found to be below the efficiency frontier, indicating opportunities to improve performance through a more optimal utilization of assets and third-party funds in generating financing. The findings suggest that the effectiveness of the intermediation function plays a more significant role than the size of resources owned in determining the efficiency level of Islamic Rural Banks in Indonesia.*

Keywords: *Islamic Rural Banks, Efficiency, Data Envelopment Analysis, Intermediation Approach, Islamic Banking.*

Abstrak. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan industri keuangan syariah melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Seiring meningkatnya persaingan industri perbankan syariah, efisiensi menjadi indikator penting dalam menilai

kemampuan BPRS mengelola sumber daya yang dimiliki secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi BPRS di Indonesia tahun 2025 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2025. Unit analisis terdiri atas 22 provinsi yang memiliki BPRS aktif di Indonesia. Variabel input yang digunakan meliputi total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK), sedangkan variabel output berupa pembiayaan. Analisis dilakukan menggunakan model DEA CCR (Constant Return to Scale) dengan orientasi input. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BPRS di Indonesia masih bervariasi antarprovinsi. Dari 22 provinsi yang dianalisis, hanya tiga provinsi yang mencapai tingkat efisiensi sempurna, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, dan DKI Jakarta dengan skor efisiensi sebesar 1,000. Sementara itu, 19 provinsi lainnya masih berada di bawah frontier efisiensi yang menunjukkan adanya peluang peningkatan kinerja melalui optimalisasi penggunaan aset dan Dana Pihak Ketiga dalam menghasilkan pembiayaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas fungsi intermediasi memiliki peran yang lebih penting dibandingkan besarnya sumber daya yang dimiliki dalam menentukan tingkat efisiensi BPRS.

Kata Kunci: Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Efisiensi, Data Envelopment Analysis, Pendekatan Intermediasi, Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, aset industri, penghimpunan dana masyarakat, serta penyaluran pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi. Salah satu lembaga keuangan syariah yang memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, BPRS berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada sektor produktif, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keberadaan BPRS memiliki arti penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah karena mampu menjangkau masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani oleh perbankan umum. Selain menjalankan fungsi intermediasi, BPRS juga berperan dalam mendorong pemerataan akses keuangan syariah serta memperkuat aktivitas ekonomi berbasis masyarakat. Oleh karena itu,

kinerja BPRS perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan BPRS menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun demikian, pertumbuhan aset dan dana yang dihimpun belum tentu mencerminkan kinerja yang optimal apabila tidak diikuti oleh kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya secara efisien. Dalam industri perbankan, efisiensi merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai kemampuan lembaga keuangan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan output secara maksimal.

Efisiensi menjadi aspek yang sangat penting bagi BPRS karena berkaitan langsung dengan kemampuan lembaga dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu mengoptimalkan penggunaan input yang dimiliki untuk menghasilkan output yang maksimal. Sebaliknya, tingkat efisiensi yang rendah mengindikasikan adanya pemborosan sumber daya yang dapat mengurangi produktivitas dan kinerja lembaga. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi menjadi penting sebagai dasar evaluasi kinerja dan penyusunan strategi pengembangan BPRS di masa mendatang.

Dalam konteks perbankan syariah, efisiensi tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari efektivitas fungsi intermediasi dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Semakin optimal dana yang berhasil dihimpun dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan, maka semakin baik pula kinerja intermediasi yang dijalankan oleh bank. Oleh karena itu, pengukuran efisiensi dengan pendekatan intermediasi dinilai lebih mampu menggambarkan fungsi utama BPRS sebagai lembaga perantara keuangan.

Salah satu metode yang banyak digunakan dalam mengukur efisiensi lembaga keuangan adalah Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan metode non-parametrik yang mampu mengukur efisiensi relatif suatu unit pengambilan keputusan atau Decision Making Unit (DMU) dengan membandingkan sejumlah variabel input dan output secara simultan. Metode ini banyak digunakan dalam penelitian perbankan karena mampu memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi masing-masing unit serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang dapat dilakukan.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji efisiensi BPRS menggunakan metode DEA. Septiani dan Rani (2020) menemukan bahwa tingkat efisiensi BPRS di Indonesia masih

menunjukkan variasi yang cukup besar antarunit analisis. Penelitian Pebrianti (2021) juga menunjukkan bahwa besarnya aset yang dimiliki tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat efisiensi yang dicapai. Sementara itu, penelitian Muallimah dan Haq (2024) menemukan bahwa kemampuan pengelolaan input dan optimalisasi pembiayaan menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat efisiensi BPRS.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan unit analisis berupa BPRS individual atau menggunakan periode pengamatan sebelum tahun 2025. Penelitian yang mengukur efisiensi BPRS berdasarkan agregasi provinsi dengan menggunakan data terbaru tahun 2025 masih relatif terbatas. Selain itu, perkembangan industri perbankan syariah yang terus mengalami perubahan menuntut adanya evaluasi efisiensi yang lebih mutakhir guna memberikan gambaran kondisi terkini BPRS di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2025 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat efisiensi BPRS antarprovinsi serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen BPRS dan regulator dalam merumuskan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja dan daya saing perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia menggunakan data numerik yang dianalisis secara statistik. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat efisiensi masing-masing provinsi berdasarkan hasil pengukuran menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA).

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan pendekatan intermediasi (intermediation approach), yang memandang bank sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan fungsi utama BPRS sebagai lembaga intermediasi dalam sistem keuangan syariah.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025. Data yang digunakan merupakan data agregat BPRS berdasarkan provinsi di Indonesia.

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri atas 22 provinsi yang memiliki BPRS aktif dan tercatat dalam Statistik Perbankan Syariah tahun 2025. Pemilihan unit analisis dilakukan berdasarkan ketersediaan data yang lengkap untuk seluruh variabel penelitian.

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel input dan satu variabel output sesuai dengan pendekatan intermediasi yang umum digunakan dalam penelitian efisiensi perbankan.

Tabel 1. Variabel Penelitian

Variabel	Jenis	Keterangan
Total Aset	Input	Total sumber daya ekonomi yang dimiliki BPRS
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Input	Dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat
Pembiayaan	Output	Dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai akad pembiayaan

Sumber: Statistik Perbankan Syariah OJK (2025), diolah.

Dalam pendekatan intermediasi, aset dan Dana Pihak Ketiga dipandang sebagai sumber daya yang digunakan oleh bank dalam menghasilkan pembiayaan sebagai output utama.

Teknik Analisis Data

Analisis efisiensi dilakukan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). DEA merupakan metode non-parametrik berbasis linear programming yang digunakan untuk mengukur efisiensi relatif suatu unit pengambilan keputusan atau Decision Making Unit (DMU) berdasarkan kombinasi beberapa input dan output secara simultan.

Penelitian ini menggunakan model CCR (Charnes, Cooper, dan Rhodes) dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS) dan orientasi input (input-oriented). Model CCR digunakan karena mampu mengukur efisiensi teknis secara keseluruhan dengan asumsi bahwa perubahan input akan menghasilkan perubahan output dalam proporsi yang sama.

Model efisiensi DEA CCR dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$h_o = \frac{\sum_{r=1}^s u_r y_{ro}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{io}}$$

Keterangan:

- h_o = skor efisiensi DMU ke-o
- y_{ro} = jumlah output ke-r
- x_{io} = jumlah input ke-i
- u_r = bobot output
- v_i = bobot input

Nilai efisiensi DEA berada pada rentang 0 sampai 1. Skor efisiensi sebesar 1 menunjukkan bahwa suatu DMU berada pada frontier efisiensi atau telah mencapai kondisi efisien. Sebaliknya, skor efisiensi di bawah 1 menunjukkan bahwa DMU masih mengalami inefisiensi dan memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja melalui optimalisasi penggunaan input.

Prosedur Analisis

Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengumpulkan data total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan BPRS berdasarkan provinsi dari Statistik Perbankan Syariah OJK tahun 2025.
2. Menyusun data input dan output sesuai dengan pendekatan intermediasi.
3. Mengolah data menggunakan perangkat lunak RStudio dengan paket Benchmarking untuk memperoleh skor efisiensi DEA.
4. Mengidentifikasi provinsi yang berada pada frontier efisiensi (skor = 1) dan provinsi yang belum efisien (skor < 1).

5. Melakukan interpretasi hasil dan membandingkannya dengan penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi efisiensi BPRS di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran Efisiensi BPRS Menggunakan DEA

Penelitian ini mengukur tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2025 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model CCR (Constant Return to Scale) dengan orientasi input. Dalam penelitian ini, total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) digunakan sebagai variabel input, sedangkan pembiayaan digunakan sebagai variabel output. Pendekatan intermediasi digunakan karena BPRS berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BPRS di Indonesia masih bervariasi antarprovinsi. Dari 22 provinsi yang dianalisis, hanya tiga provinsi yang mencapai skor efisiensi sempurna (efficiency score = 1,000), yaitu Kepulauan Riau, Lampung, dan DKI Jakarta. Sementara itu, sebanyak 19 provinsi lainnya masih berada di bawah frontier efisiensi sehingga menunjukkan adanya peluang peningkatan kinerja melalui optimalisasi penggunaan aset dan Dana Pihak Ketiga yang dimiliki.

Tabel 4. Hasil Pengukuran Efisiensi DEA-CCR BPRS Tahun 2025

No	Provinsi	Skor DEA	Status
1	Kepulauan Riau	1,0000	Efisien
2	Lampung	1,0000	Efisien
3	DKI Jakarta	1,0000	Efisien
4	Sulawesi Selatan	0,9617	Tidak Efisien
5	Nusa Tenggara Barat	0,9531	Tidak Efisien
6	Jawa Barat	0,8719	Tidak Efisien
7	Maluku Utara	0,8634	Tidak Efisien
8	Kalimantan Selatan	0,8463	Tidak Efisien

9	Nanggroe Aceh Darussalam	0,8492	Tidak Efisien
10	Sumatera Barat	0,8445	Tidak Efisien
11	Jawa Tengah	0,8266	Tidak Efisien
12	Bengkulu	0,8206	Tidak Efisien
13	DI Yogyakarta	0,7941	Tidak Efisien
14	Sumatera Utara	0,7909	Tidak Efisien
15	Sumatera Selatan	0,7582	Tidak Efisien
16	Riau	0,7534	Tidak Efisien
17	Sulawesi Tengah	0,7193	Tidak Efisien
18	Jawa Timur	0,7048	Tidak Efisien
19	Bangka Belitung	0,5464	Tidak Efisien
20	Banten	0,4897	Tidak Efisien
21	Kalimantan Tengah	0,4783	Tidak Efisien
22	Kalimantan Timur	0,4592	Tidak Efisien

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan DEA-CCR dengan bantuan software RStudio (2025).

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa hanya tiga provinsi yang berhasil mencapai efisiensi sempurna, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, dan DKI Jakarta. Ketiga provinsi tersebut berada pada frontier efisiensi dan dapat dijadikan sebagai acuan (benchmark) bagi provinsi lain yang masih mengalami inefisiensi. Sebaliknya, sebagian besar provinsi masih memperoleh skor efisiensi di bawah satu yang menunjukkan bahwa penggunaan input belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan pembiayaan.

Tabel 5. Ringkasan Tingkat Efisiensi BPRS Tahun 2025

Kategori	Jumlah Provinsi	Persentase
Efisien	3	13,64%
Tidak Efisien	19	86,36%
Total	22	100%

Sumber: Hasil pengolahan data (2025).

Tabel 5 menunjukkan bahwa hanya 13,64% provinsi yang mencapai tingkat efisiensi sempurna, sedangkan 86,36% provinsi lainnya masih berada dalam kategori tidak efisien.

Temuan ini mengindikasikan bahwa secara umum kinerja intermediasi BPRS di Indonesia masih memerlukan perbaikan agar pemanfaatan aset dan Dana Pihak Ketiga dapat menghasilkan pembiayaan yang lebih optimal.

Analisis Provinsi yang Efisien

Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, dan DKI Jakarta berhasil mencapai skor efisiensi sebesar 1,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ketiga provinsi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk menghasilkan output berupa pembiayaan. Dalam konsep DEA, unit yang memperoleh skor efisiensi sempurna dianggap berada pada frontier efisiensi sehingga menjadi acuan bagi unit lain yang belum efisien.

Keberhasilan DKI Jakarta dapat dikaitkan dengan tingginya aktivitas ekonomi, akses terhadap pasar keuangan yang lebih luas, serta infrastruktur keuangan yang lebih berkembang dibandingkan wilayah lain. Kondisi tersebut memungkinkan BPRS menjalankan fungsi intermediasi secara lebih efektif. Sementara itu, Kepulauan Riau dan Lampung menunjukkan bahwa efisiensi tidak selalu ditentukan oleh besarnya aset yang dimiliki, melainkan oleh kemampuan manajemen dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara produktif.

Analisis Provinsi yang Belum Efisien

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi masih berada pada kondisi tidak efisien. Jawa Barat misalnya, meskipun memiliki total aset dan Dana Pihak Ketiga terbesar dibandingkan provinsi lainnya, hanya memperoleh skor efisiensi sebesar 0,8719. Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya aset tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat efisiensi yang dicapai.

Fenomena serupa juga terlihat pada Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki aset relatif besar namun belum mampu mencapai kondisi efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki, khususnya dalam meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan.

Provinsi dengan tingkat efisiensi terendah adalah Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan skor masing-masing sebesar 0,4592 dan 0,4783. Rendahnya tingkat

efisiensi pada kedua provinsi tersebut menunjukkan bahwa input yang digunakan belum mampu dikonversi secara optimal menjadi output pembiayaan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kualitas manajemen pembiayaan serta penguatan fungsi intermediasi agar kinerja BPRS dapat lebih optimal.

Efisiensi BPRS dalam Perspektif Pendekatan Intermediasi

Pendekatan intermediasi memandang bank sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dana. Oleh karena itu, tingkat efisiensi sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam mengubah aset dan Dana Pihak Ketiga menjadi pembiayaan yang produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi masih menghadapi kendala dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi tersebut. Besarnya Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan. Akibatnya, sebagian sumber daya yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga menimbulkan inefisiensi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena fungsi intermediasi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan sosial dan ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan bagi masyarakat. Semakin efektif dana yang dihimpun dapat disalurkan kepada sektor produktif, maka semakin besar pula kontribusi BPRS terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Septiani dan Rani (2020) yang menemukan bahwa tingkat efisiensi BPRS di Indonesia masih menunjukkan variasi yang cukup besar antarunit analisis. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh BPRS mampu mencapai kondisi efisien meskipun memiliki sumber daya yang relatif besar.

Temuan penelitian ini juga mendukung penelitian Pebrianti (2021) yang menyatakan bahwa besarnya aset dan Dana Pihak Ketiga tidak selalu menjamin tingginya tingkat efisiensi. Efisiensi lebih ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana secara produktif kepada masyarakat.

Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat penelitian Wasiaturrahma et al. (2020) yang menjelaskan bahwa kualitas pengelolaan sumber daya dan efektivitas fungsi intermediasi merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat efisiensi lembaga keuangan. Oleh karena itu, upaya peningkatan efisiensi BPRS perlu difokuskan pada penguatan manajemen pembiayaan, tata kelola lembaga, dan optimalisasi penyaluran dana kepada sektor produktif.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi BPRS di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Fokus perbaikan sebaiknya diarahkan pada optimalisasi fungsi intermediasi, peningkatan kualitas pembiayaan, penguatan manajemen risiko, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung operasional perbankan syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia tahun 2025 menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) model CCR dengan pendekatan intermediasi. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan total aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel input serta pembiayaan sebagai variabel output.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efisiensi BPRS di Indonesia masih bervariasi antarprovinsi. Dari 22 provinsi yang dianalisis, hanya tiga provinsi yang berhasil mencapai tingkat efisiensi sempurna, yaitu Kepulauan Riau, Lampung, dan DKI Jakarta dengan skor efisiensi sebesar 1,000. Ketiga provinsi tersebut mampu mengoptimalkan penggunaan aset dan Dana Pihak Ketiga dalam menghasilkan pembiayaan sehingga berada pada frontier efisiensi.

Sebaliknya, sebanyak 19 provinsi lainnya masih berada pada kondisi tidak efisien dengan skor DEA di bawah 1,000. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar BPRS masih memiliki peluang untuk meningkatkan kinerja pembiayaan tanpa harus menambah jumlah input yang digunakan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besarnya aset dan Dana Pihak Ketiga tidak selalu mencerminkan tingkat efisiensi yang tinggi. Efisiensi

lebih ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana secara produktif kepada masyarakat.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan kualitas fungsi intermediasi BPRS melalui optimalisasi penyaluran pembiayaan, penguatan tata kelola lembaga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam operasional perbankan syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing BPRS di tengah perkembangan industri keuangan syariah yang semakin kompetitif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data tahun 2025 dan melibatkan tiga variabel utama dalam model DEA. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data panel dalam beberapa periode pengamatan serta menambahkan variabel lain seperti biaya operasional, pendapatan operasional, laba, dan rasio pembiayaan bermasalah agar diperoleh gambaran efisiensi yang lebih komprehensif

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Fadhlul Mubarak selaku dosen pengampu atas arahan yang diberikan selama mata kuliah berlangsung. Apresiasi juga disampaikan kepada Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi selaku lembaga afiliasi penulis. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menyediakan data Statistik Perbankan Syariah sebagai sumber utama penelitian, sehingga sangat membantu penulis dalam melakukan pengelolaan dan penyelesaian studi ini. Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam artikel ini terdapat kekeliruan, kekurangan, atau ketidaktepatan dalam penyajian data yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Endri. (2009). Kinerja efisiensi teknis bank pembangunan daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 21–29.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2008). Comparing the efficiency of Islamic banks in Indonesia and Malaysia using Data Envelopment Analysis. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 11(2), 95–119.
- Banker, R. D., Charnes, A., & Cooper, W. W. (1984). Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis. *Management Science*, 30(9), 1078–1092. <https://doi.org/10.1287/mnsc.30.9.1078>
- Berger, A. N., & Humphrey, D. B. (1997). Efficiency of financial institutions: International survey and directions for future research. *European Journal of Operational Research*, 98(2), 175–212. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(96\)00342-6](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(96)00342-6)
- Charnes, A., Cooper, W. W., & Rhodes, E. (1978). Measuring the efficiency of decision making units. *European Journal of Operational Research*, 2(6), 429–444. [https://doi.org/10.1016/0377-2217\(78\)90138-8](https://doi.org/10.1016/0377-2217(78)90138-8)
- Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O'Donnell, C. J., & Battese, G. E. (2005). *An introduction to efficiency and productivity analysis* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/b136381>
- Cooper, W. W., Seiford, L. M., & Tone, K. (2007). *Data Envelopment Analysis: A comprehensive text with models, applications, references and DEA-Solver software* (2nd ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-45283-8>
- Fare, R., Grosskopf, S., & Lovell, C. A. K. (1994). *Production frontiers*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511551710>
- Fadhul Mubarak, Aslanargun, A., & Siklar, İ. (2021). High order spatial weighting matrix using Google Trends. *International Journal of Research and Review*, 8(11), 388–396. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20211150>
- Fadhul Mubarak, Aslanargun, A., & Siklar, İ. (2022). GSTARIMA model with missing value for forecasting gold price. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 6(1), 90–100. <https://doi.org/10.29244/ijsa.v6i1.90-100>
- Fadhul Mubarak, Mardhotillah, B., Sundara, V. Y., Germansah, & Jiblatih, P. (2026). Pengelompokan provinsi berdasarkan dinamika nasabah-debitur BPR Syariah menggunakan metode clustering. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 5(3), 3082–3092. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i3.14569>
- Hadad, M. D., Hall, M. J. B., Kenjegalieva, K., Santoso, W., & Simper, R. (2011). Banking efficiency and stock market performance: Evidence from Indonesia. *Applied Financial Economics*, 21(16), 1141–1154. <https://doi.org/10.1080/09603107.2011.561196>
- Ismail, F., Majid, M. S. A., & Rahim, R. A. (2013). Efficiency of Islamic and conventional banks in Malaysia. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 11(1), 92–107. <https://doi.org/10.1108/JFRA-03-2013-0011>

- Kamarudin, F., Sufian, F., & Nassir, A. M. (2016). Does country governance foster revenue efficiency of Islamic and conventional banks in GCC countries? *EuroMed Journal of Business*, 11(2), 181–211. <https://doi.org/10.1108/EMJB-06-2015-0026>
- Muallimah, L., & Haq, F. (2024). The use of Data Envelopment Analysis (DEA) method in measuring the efficiency of Sharia Rural Banks in D.I. Yogyakarta. *Journal of Islamic Economic Scholar*, 5(1), 116–136. <https://doi.org/10.14421/jies.2024.5.1.116-136>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik Perbankan Syariah Tahun 2025*. Jakarta: OJK.
- Pebrianti, I. Y. (2021). Analisis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Barat menggunakan metode Data Envelopment Analysis. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 1(2), 424–434. <https://doi.org/10.35313/jaief.v1i2.2475>
- Rosman, R., Wahab, N. A., & Zainol, Z. (2014). Efficiency of Islamic banks during the financial crisis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(1), 36–58. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2012-0004>
- Rusyiana, A. S. (2018). Efisiensi dan stabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 11(2), 203–222. <https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.7033>
- Septiani, E., & Rani, L. N. (2020). Analisis tingkat efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2012–2018 menggunakan metode Data Envelopment Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(7), 1378–1390. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20207pp1378-1390>
- Sufian, F., & Noor, M. A. N. M. (2009). The determinants of Islamic banks' efficiency changes. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(2), 120–138. <https://doi.org/10.1108/17538390910965149>
- Tone, K. (2001). A slacks-based measure of efficiency in Data Envelopment Analysis. *European Journal of Operational Research*, 130(3), 498–509. [https://doi.org/10.1016/S0377-2217\(99\)00407-5](https://doi.org/10.1016/S0377-2217(99)00407-5)
- Wasiaturrahma, Sukmana, R., Ajija, S. R., Salama, S. C. U., & Hudaifah, A. (2020). Financial performance of rural banks in Indonesia: A two-stage DEA approach. *Heliyon*, 6(7), e04390. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04390>
- Yudistira, D. (2004). Efficiency in Islamic banking: An empirical analysis of eighteen banks. *Islamic Economic Studies*, 12(1), 1–19.